



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : ~~586~~ /PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BANDAR
PANJANG TUO KECAMATAN MUARASIPONGI DAN DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang pada Pokoknya memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di Desa Bandar Panjang Tuo TPS 001 Kecamatan Muarasipongi dan Desa Kampung Baru TPS 001 dan TPS 002 Kecamatan Panyabungan Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi dan Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing

7

Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PHP.BUP-XIX/2021;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 266//PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 184/PY.02.1-SD/12/Prov /III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Mandailing Natal;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 479/PP.01.2-Kpt/1213/KPU-Kab/III/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 464 / PP.01.2-Kpt / 1213 / KPU-Kab / III / 2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 572/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 572/PP.04.2-Kpt/1213/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi dan Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada tanggal 10 April 2021 untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BANDAR PANJANG TUO KECAMATAN MUARASIPONGI DAN DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L\P	DESA/KELURAHAN
1.	NUR MASIDAH	P	Bandar Panjang Tuo
2.	HENDRA PARIDUAN HUTAPEA	L	Kampung Baru

sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara di Desa Bandar Panjang Tuo Kecamatan Muarasipongi dan Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara :

- memimpin kegiatan Panitia Pemungutan Suara;
- mengundang anggota untuk mengadakan rapat Panitia Pemungutan Suara;
- mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara;
- mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kabupaten Mandailing Natal pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 10 April 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,



F. Syarif
FADHILLAH SYARIEF